

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Farid, A.Z. Abidin, 1981, *Sejarah dan Perkembangan Asas Opportunitas di Indonesia*, Ujung Pandang : UNHAS
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap M.Yahya, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar grafika.
- _____, 2003, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Prakoso, Djoko, 1988, *Pemecahan Berkas Perkara*, Yogyakarta : Liberty
- Projodikoro, Wirjono, 1976, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sumur Badung.
- Makarao, Taufik Mohammad, dan Suharsil, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Makawimbang, Hernold Ferry, 2015, *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*, Yogyakarta : Thafa Media.
- Marpaung, Leden, 2009, *proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penidikan) bagian pertama edisi kedua*, Jakarta : sinar grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Nugroho, Hibnu, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Penerbit Media Prima Aksara.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1990, *Komentat Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Sumitro, Ronny Hanitijo, 2005, *Penelitian Hukum Normati*. Jakarta : Kencana.

Peraturan Perundang-undangan: .

Indonesia, Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____, Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang

_____, Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

_____, Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

Sumber lain:

Aditya Wati, I Gusti Ayu, 2016, *Pemecahan Perkara (Splitsing) Dalam Pra Penuntutan*. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana..Bali.Vol 4 No. 2 Februari.

Anonim. Hukum Online, 2015, *Hasil Wawancara Dengan Beberapa Ahli Hukum Acara Pidana Secara Terpisah* di publikasikan pada hari Minggu 29 Mei 2015, diakses pada 31 Juli 2017

Fachrul Khairuddin, 2013, artikel, *Kronologi Kasus Korupsi Proyek Hambalang*, http://www.kompasiana.com/fachrul_khairuddin/kronologi-kasus-korupsi-proyek-hambalang/ diakses pada Kamis, 2 Maret 2017 pukul 14.55 WIB.

[Ham zar](#), 2016, artikel, *Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)* <http://hukum.tatanegara2.com/2016/05/pelaksanaan-pemecahan-perkara-pidana>. Dipublikasikan pada hari Minggu 29 Mei 2016 ; diakses pada, Senin tanggal 27 Maret 2017. pukul 13.59.

Loebby Loqman, 1995, Jurnal : “Saksi Mahkota,” Forum Keadilan (Nomor 11).

Muhammad Pandu Fajar Buana, 2016, *Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Delik Penyertaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Ambarawa, Semarang : Universitas Negeri Semarang*.

Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHAP*, Surabaya : Graha media Press, <http://gramediapress.com>, diakses pada 3 Maret 2017 pukul 19.17 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar, dkk. 2009. *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaan Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung. Widya Padjadjaran.
- Darmono. 2013. *Penyimpangan Perkara Pidana Seponering dalam Penegakan Hukum*. Jakarta. Solusi Publishing.
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar grafika.
- _____. 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Makara, Taufik Mohammad dan Suharsil. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Makawimbang, Hernold Ferry. 2015. *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*. Yogyakarta. Thafa Media.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan Dan Penidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Nugroho, Hibnu. 2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Media Prima Aksara.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. Yogyakarta. Liberty.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*. Bandung. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung. Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers.

Sumitro ,Ronny Hanitijo. 2005. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Kencana.

Susanto, Anthon F. 2004. *Wajah Peradilan Kita*.Bandung. Rafika Aditama.

Sunggu, Ompu Tumbur. 2012. *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*.Yogyakarta. Total Media.

Peraturan Perundang-undangan: .

Indonesia, Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____, Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

_____, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

_____, Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

_____,Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 62/PID.SUS/TPK/2013/PN .JKT. PST

Sumber lain:

Aditya Wati, I Gusti Ayu, 2016, *Pemecahan Perkara (Splitsing) Dalam Pra Penuntutan*. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana..Bali.Vol 4 No. 2 Februari.

Anonim. Hukum Online. 2015. *Hasil Wawancara Dengan Beberapa Ahli Hukum Acara Pidana Secara Terpisah* di publikasikan pada hari Minggu 29 Mei, diakses pada 31 Juli 2017

Loebby Loqman, 1995, Jurnal: “Saksi Mahkota,” Forum Keadilan (Nomor 11).

Fachrul Khairuddin, 2013, artikel,*kronologi kasus/ proyek Hambalang*, [http://www.kompasiana.com/fachrulkhairuddin/ kronologi-kasus-korupsi-proyek-hambalang/](http://www.kompasiana.com/fachrulkhairuddin/kronologi-kasus-korupsi-proyek-hambalang/)diakses pada Kamis, 2 Maret 2017 pukul 14.55 WIB.

Ham zar, 2016, artikel, *pelaksanaan pemecahan perkara pidana (splitsing)* <http://hukumtatanegara2.blogspot.co.id/2016/05/pelaksanaan-pemecahan-perkara-pidana.html> Diposkan pada hari Minggu 29 Mei 2016 ; diakses pada, senin tanggal 27 maret 2017. pukul 13.59.

Muhammad Pandu Fajar Buana. 2016. *Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Delik Penyertaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Ambarawa*. Semarang. Universitas Negeri Semarang.

Sumber lain:

Anonim. Hukum Online. 2015. *hasil wawancara dengan beberapa ahli hukum acara pidana* terpisah, <http://hukumonline.com/wawancara-ahli-hukum-acara-pidana.html> di publikasikan pada hari Minggu, 29 Mei.

Dhani Irawan. Detik News. Di publikasikan pada Minggu 19 Feb 2017, 21:46 WIB. *Kasus Hambalang, KPK Tak Akan Berhenti di Choel Mallarangeng Saja*, news.detik.com/berita/d-3426499/kasus-hambalang-kpk-tak-akan-berhenti-di-choel-mallarangeng-saja. Diakses pada rabu 19 April 2017 pukul 16.23 WIB.

Fachrul Khairuddin. 2013. Artikel. *kronologi kasus korupsi proyek Hambalang*, <http://kompasiana.com/fachrulkhairuddin/kronologi-kasus-korupsi-proyek-hambalang/html> diakses pada kamis, 2 Maret 2017 .pukul 14.55 WIB.

Ham zar. 2016. Artikel : *pelaksanaan pemecahan perkara pidana (splitsing)* <http://hukumtatanegara2.blogspot.co.id/2016/05/pelaksanaan-pemecahan-perkara-pidana.html> Dipublikasian pada hari Minggu 29 Mei 2016; diakses pada, senin tanggal 27 maret 2017. pukul 13.59.

Loebby Loqman. 1995. Jurnal : *Saksi Mahkota*. Forum Keadilan (Nomor 11). <http://forumkeadilan.com>, diakses pada hari minggu 29 Mei 2016

Mahkamah Agung RI, 2003, *Beberapa Makalah Tentang Hukum Acara Pidana Dan Peradilan Hak Asasi Manusia*, Jakarta.

Muhammad Pandu Fajar Buana. 2016. *Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Delik Penyertaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)* Universitas Negeri Semarang.